



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO

 <https://diskominfo.probolinggokota.go.id>

 Diskominfo Kota Probolinggo

 diskominfokotaprobolinggo

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO	10
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.....	10
2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.....	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	43
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan.....	44
2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	44
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.....	48
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	48
2.2.2 Isu Strategis	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029	55
3.3 Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029	57
3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029	61
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB V PENUTUP.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika.....	20
Tabel 2. 2 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berdasarkan Pendidikan	20
Tabel 2. 3 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berdasarkan Eselon.....	21
Tabel 2. 4 Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.....	21
Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika.....	22
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana TIK Dinas Komunikasi dan Informatika	22
Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana Responsif Gender	23
Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	25
Tabel 2. 9 Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	39
Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	40
Tabel 2. 12 Kelompok Sasaran Layanan	43
Tabel 2. 13 Data Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	45
Tabel 2. 14 Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	48
Tabel 2. 15 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	52
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.....	56
Tabel 3. 2 Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	57
Tabel 3. 3 Penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029	59
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029	61
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun 2025-2029.....	64
Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	82
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	100
Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Utama.....	103
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	19
Gambar 2. 2 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi 2020-2024.....	38
Gambar 2. 3 Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2020-2024	41
Gambar 2. 4 Capaian Kinerja Urusan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	42
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo memiliki peran penting dalam pembangunan di Kota Probolinggo, khususnya dalam upaya digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik serta diseminasi informasi tentang kebijakan dan agenda pemerintah daerah kepada masyarakat secara merata dan inklusif.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dituntut untuk mampu menerjemahkan dokumen perencanaan pembangunan Kota Probolinggo kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) maupun Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program, kekuatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.. Dalam proses penyusunannya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2025-2029, Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) 2025-2029 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 2025-2029.

Penyusunan Renstra yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD serta mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 3);
36. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 36);
37. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 143 Tahun 2018 Tentang Tahapan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 143);
38. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 50);
39. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 52);
40. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 99);
41. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 memiliki maksud agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya

dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kota Probolinggo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai pedoman/acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pencapaian keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan kinerja, menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi serta mendukung pembangunan yang inklusif dan responsif gender.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024. Mengacu pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2022, adalah terdiri atas :

(1) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan kedua regulasi diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas;
 - c. perumusan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - d. pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 - e. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - f. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - j. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan;
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;

- e. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- g. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- h. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
- b. membagi tugas, memberikan petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan informasi publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan, pengelolaan opini publik serta pengelolaan data statistik sektoral;
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor;
- f. melaksanakan penyusunan data statistik sektoral dan dokumentasi daerah meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, pembangunan metadata dan diseminasi data statistik sektoral;
- g. melaksanakan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektor; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan tugas di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik;

- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, media publik dan kelembagaan serta kemitraan komunikasi publik; dan pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data elektronik serta keamanan informasi dan persandian; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pada Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi aparatur pemerintah;
- g. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- h. melaksanakan pengelolaan keamanan dan komunikasi sandi;
- i. melaksanakan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi dan persandian;
- j. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k. melaksanakan Pengelolaan *Security Operation Center (SOC)* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- l. melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi elektronik;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Layanan E–Government

Bidang Layanan e–Government mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi :

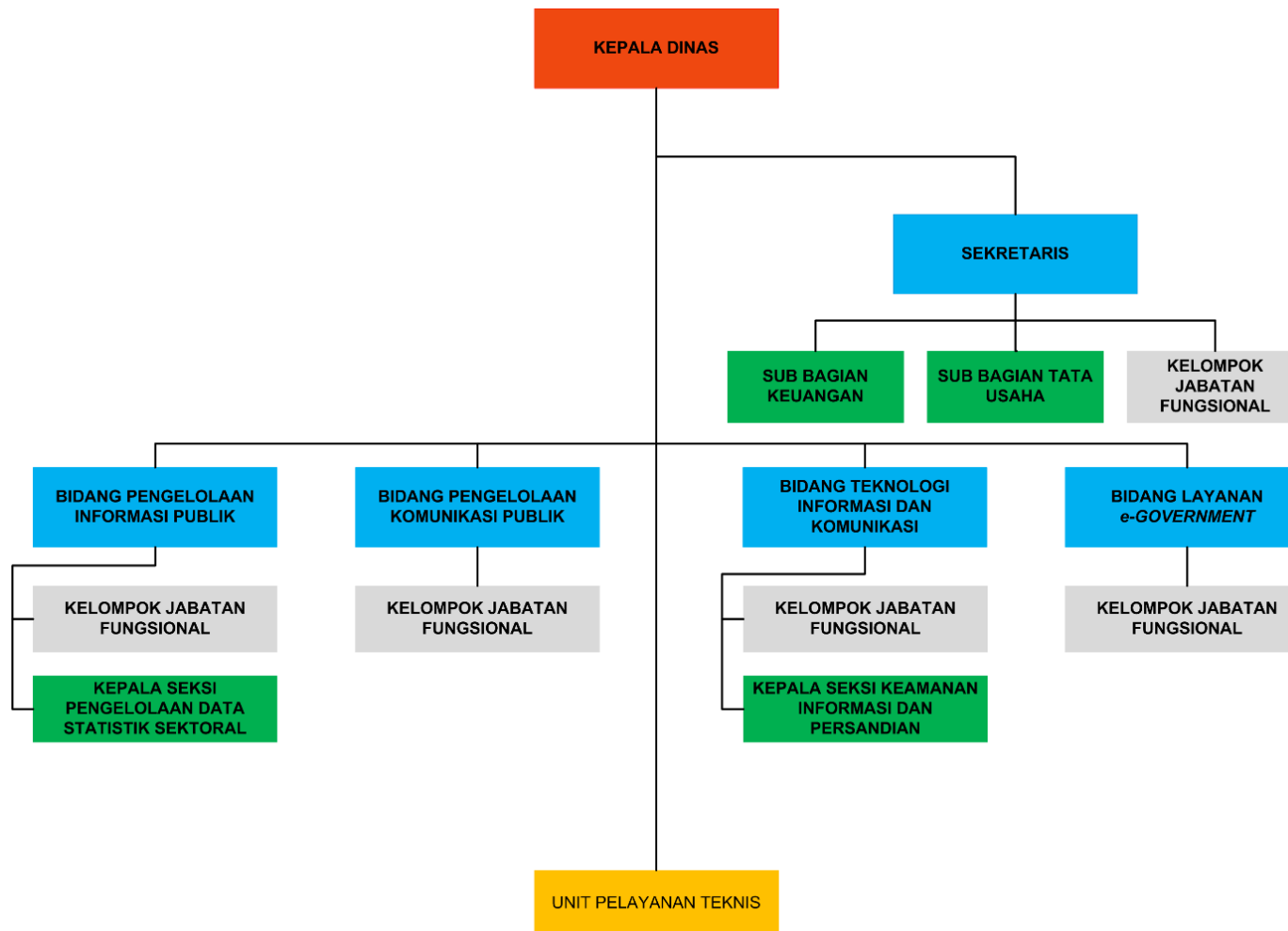
- a. perumusan rencana kerja di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang layanan e-government yang meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government dan tata kelola e-government; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Data Statistik Sektoral; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Layanan e-Government, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN. Jumlah personil adalah sebanyak 64 orang, berdasarkan komposisi pangkat dan golongan/ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH		KETERANGAN	
		L	P	DISABILITAS	NON DISABILITAS
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0	0
2	Pembina Tk I (IV/b)	1	0	0	1
3	Pembina (IV/a)	4	2	0	6
4	Penata Tk I (III/d)	7	4	0	11
5	Penata (III/c)	1	1	0	2
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	4	0	5
7	Penata Muda (III/a)	2	5	0	7
8	Pengatur Tk. I (II/d)	5	0	0	5
9	Pengatur (II/c)	1	1	0	2
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	0	0	1
11	(VII)	4	0	0	4
12	Non ASN	14	5	0	19
JUMLAH		42	22	0	64

Sumber: Simpeg 2025

Berdasarkan pendidikan umum yang dimiliki, SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN UMUM	PNS		NON ASN		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	Doktoral (S-3)	1	0	0	0	1
2	Pasca Sarjana (S-2)	11	4	0	0	15
3	Sarjana (S-1)	5	10	6	4	25
4	Sarjana Muda (D-3)	7	3	0	0	10
5	SLTA	4	0	8	1	13
JUMLAH		28	17	14	5	64

Sumber: Simpeg 2025

Dilihat dari data Eselonering, karyawan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo berdasarkan Eselon

NO.	STATUS	ESELON	JUMLAH		KET.
			L	P	
1	PNS	II.b	1	-	Kepala Dinas
2	PNS	III.a	1	-	Sekretaris
3	PNS	III.b	3	1	Kepala Bidang
4	PNS	IV.a	2	2	Kepala Seksi dan Kepala Subbagian
5	PNS	JF	11	11	Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistisi, Penerjemah, Sandiman, Perencana
6	PNS	Pelaksana	6	3	-
7	PPPK	JF	4	-	Pranata Komputer, Arsiparis
8	Non ASN	-	14	5	-
JUMLAH			42	22	

Sumber: Simpeg 2025

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Selama 5 (lima) tahun terakhir Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo didukung oleh anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

NO	URAIAN BELANJA	TAHUN ANGGARAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	BELANJA OPERASI	14.037.21 2.387,00	11.381.543. 370,00	13.012.962. 067,00	10.055.789. 771,00	10.824.079 .820,00
	Belanja Pegawai	7.067.478 .726,00	11.381.543. 370,00	6.661.619.2 70,00	6.300.444.9 77,00	6.535.693. 905,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.969.733 .661,00	4.966.386.0 36,00	6.351.342.7 97,00	3.755.344.7 94,00	4.288.385. 915,00
2	BELANJA MODAL	1.370.088 .000,00	659.262.00 0,00	5.671.824.0 00,00	245.000.00 0,00	132.036.00 0,00
Jumlah		15.407.30 0.387,00	12.040.805. 370,00	18.684.786. 067,00	10.300.789. 771,00	10.956.115 .820,00

Sumber: DPA

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo didukung dengan sarana dan prasarana kantor karena sarana dan prasarana tersebut merupakan unsur penting dalam kegiatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

No	Uraian	Saldo (Rp)	Keterangan
1	Tanah	732.200.000,00	Berupa tanah untuk bangunan gedung kantor
2	Peralatan dan mesin	15.471.235.313,73	Berupa aset berwujud (peralatan) dan aset tidak berwujud (aplikasi)
3	Gedung dan Bangunan	1.855.547.358,11	Berupa Kantor, Radio Suara Kota dan Papan penyangga (reklame)
4	Jalan. irigasi dan jaringan	64.325.000,00	Berupa jaringan listrik dan telepon
5	Aset Tetap Lainnya	-	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	15.472.179,00	
7	Akumulasi Penyusutan	-13.144.778.772,51	
	Jumlah aset	4.994.001.078,33	

Sumber: LKPD Tahun 2024

Dalam mendukung kinerja terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, secara garis besar sarana prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

No	Nama Barang	Jumlah
1	Software	6 unit
2	Kamera	23 unit
3	PC/Laptop	93 unit
4	Papan Visual	4 unit
5	Router	134 unit

Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana Responsif Gender
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Probolinggo

NO	SARANA PRASARANA	KETERSEDIAAN		PENJELASAN
		TERSEDIA	BELUM	
1	Ruang Laktasi		√	
2	Toilet responsif gender	√		
3	Toilet khusus kelompok rentan		√	
4	Akses Disabilitas (Guiding Block, Jalan Landai dengan pegangan rambat)	√		
5	Jalur evakuasi bencana		√	
6	Kursi roda/tongkat/krek	√		
7	Pojok Baca	√		
8	Arena Bermain untuk Anak		√	
9	Loket Khusus Kelompok Rentan		√	
10	Parkir Khusus Kelompok Rentan	√		

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahannya (terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo melaksanakan 3 (tiga) urusan, yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
2. Urusan Statistik
3. Urusan Persandian

Pada sub bab ini diuraikan beberapa capaian indikator kinerja pelaksanaan ketiga urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, baik capaian kinerja pelayanan maupun indikator makro penyelenggaraan urusan.

2.1.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam tugasnya, dinas memiliki peran penting guna mendukung transformasi digital pemerintah daerah serta mendukung peningkatan pelayanan publik.

Sebagai evaluasi capaian Renstra sebelumnya, capaian Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata*
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks SPBE	-	-	-	3,2	3,4	3,4	3,5	3,6	3,35	2,59	1,97	3,1	4,04	105%	76%	58%	89%	112%	88% (baik)
2	Persentase e-Government Perangkat Daerah yang terintegrasi	-	-	-	52,50 %	55,00 %	57,50 %	60,00 %	62,50 %	57,14 %	62,86 %	68,57 %	89,29 %	100%	109%	114%	119%	149%	160%	130% (Sangat baik)
3	Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar	-	-	-	65%	75,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00 %	65,63 %	85,71 %	91,43 %	96,43 %	100%	101%	114%	114%	113%	111%	111% (Sangat baik)
4	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Sangat baik)

*Keterangan Kategori:

- Diatas 80% baik
- Diatas 96% sangat baik
- Dibawah 80% kurang baik

Berdasarkan Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo diatas merupakan capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. SPBE terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator, meliputi: domain 1 kebijakan SPBE (Aspek kebijakan internal tata kelola SPBE); domain 2 Tata Kelola SPBE (Aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE); domain 3 manajemen SPBE (Aspek penerapan manajemen SPBE, audit TIK); domain 4 Layanan SPBE (Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, layanan publik).

Formulasi Perhitungan: **Nilai indeks SPBE = Σ NDj X BDj**

Keterangan:

NDj : Nilai Indeks Domain ke-j, yaitu nilai capaian atau skor yang diperoleh untuk domain tertentu

BDj : Nilai Bobot Domain ke-j, yaitu nilai bobot yang diberikan pada setiap domain

Indeks SPBE mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Capaian sempat menurun tajam pada tahun 2022 (1,97) namun meningkat signifikan hingga mencapai 4,04 pada 2024, melampaui target tahun tersebut (3,6) dengan rasio capaian sebesar 112%.

Capaian Indeks SPBE pada tahun 2022 mengalami penurunan yang merosot tajam dibandingkan tahun sebelumnya (2021), yaitu sebesar 1,97. Hal ini karena domain tata kelola SPBE dan Manajemen SPBE kurang maksimal masih belum begitu mendapat perhatian.

2. Persentase e-Government Perangkat Daerah yang Terintegrasi

Indikator kinerja ini untuk mengevaluasi tingkat implementasi pelaksanaan e-government di Kota Probolinggo, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Perangkat Daerah dengan Sistem Elektronik yang Terintegrasi}}{\Sigma \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Persentase e-Government Perangkat Daerah yang Terintegrasi menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 57,14% pada tahun 2020 menjadi 89,29% di tahun 2023. Pada tahun 2024, capaiannya tetap 100%

dari target, dengan rata-rata rasio capaian melebihi 100% selama empat tahun terakhir.

3. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar

Indikator ini untuk mengukur implementasi perangkat daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun rumusan formulasi yang digunakan adalah:

$$\frac{\Sigma \text{ Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Sesuai Standar juga mengalami tren positif, dari 65,63% (2020) menjadi 100% (2024). Capaian ini konsisten di atas target, dengan rasio capaian di atas 100% setiap tahunnya.

4. Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Hal ini merupakan indikator kesekretariatan yang diampu oleh sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan formulasi pengukuran:

$$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum + Kepegawaian + BMD + Program + Keuangan)}}{5}$$

Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Ditangani Sesuai Ketentuan mencapai 100% setiap tahun, menunjukkan konsistensi tinggi dalam pemenuhan standar administrasi.

Selama 5 tahun (2020-2024), rata-rata capaian indeks SPBE sebesar 88% (baik), Persentase e-Government Perangkat Daerah yang terintegrasi sebesar 130% (sangat baik), Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar sebesar 111% (sangat baik) dan Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan sebesar 100% (sangat baik).

Capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Komitmen kuat pimpinan daerah dan seluruh perangkat daerah terhadap transformasi digital dan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
2. Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai serta pengembangan aplikasi yang mendukung integrasi layanan antar-perangkat daerah;
3. Adanya regulasi dan kebijakan daerah yang jelas serta mendukung, seperti peraturan wali kota terkait SPBE dan keterbukaan informasi publik;
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta evaluasi rutin terhadap capaian indikator;
5. Kolaborasi lintas perangkat daerah serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, yang memperkuat ekosistem pelayanan publik.

Meskipun capaian indikator tergolong baik hingga sangat baik, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan, yaitu:

1. Variasi kompetensi SDM antar-perangkat daerah yang menyebabkan tingkat adopsi teknologi belum sepenuhnya merata;
2. Keterbatasan anggaran pada tahun-tahun tertentu yang menghambat perluasan atau modernisasi infrastruktur TIK;
3. Kendala interoperabilitas antara sistem lama (legacy system) dengan aplikasi terintegrasi, yang memerlukan penyesuaian teknis tambahan;
4. Gangguan teknis seperti downtime jaringan atau server yang berpotensi mengganggu kelancaran layanan.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan secara umum, kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan dan konsistensi yang baik dalam pelaksanaan e-Government, keterbukaan informasi publik dan administrasi perkantoran, dengan sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan.

Selama periode renstra sebelumnya, gambaran potensi dan pendanaan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 9 Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Urusan Komunikasi dan Informatika	6.139.462.600	15.363.940.387	11.820.805.370	18.573.619.567	10.302.497.184	5.981.766.063	13.060.246.536	11.347.595.420	16.584.192.353	9.937.371.688	97,43	85,01	96,00	89,29	96,46	34,95	27,82	92,84	Baik
PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA APARATUR PEMERINTAH	1.191.068.700					1.152.103.323					96,73							96,73	Sangat Baik
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	120.000.000					119.450.000					99,54							99,54	Sangat Baik
PENGELOLAAN TATA USAHA PERKANTORAN	1.064.108.700					1.025.693.323					96,39							96,39	Sangat Baik
PENGELOLAAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	6.960.000					6.960.000					100,00							100,00	Sangat Baik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.037.087.387	7.815.111.370	7.705.903.869	7.342.990.853		9.944.621.685	7.463.809.825	7.408.308.389	7.173.486.915		82,62	95,50	96,14	97,69	-13,73	-9,62	92,99	Baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000.000	13.500.000	2.887.500	3.425.000		3.985.500	13.417.000	2.835.000	3.345.000		99,64	99,39	98,18	97,66	59,17	58,59	98,72	Sangat Baik
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000.000	6.000.000	637.500	400.000		1.985.500	5.967.000	615.000	397.500		99,28	99,45	96,47	99,38	24,46	25,16	98,64	Sangat Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.000.000	7.500.000	2.250.000	3.025.000		2.000.000	7.450.000	2.220.000	2.947.500		100,00	99,33	98,67	97,44	79,81	78,36	98,86	Sangat Baik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.078.194.726	6.435.073.334	6.663.311.770	6.207.478.214		6.218.565.290	6.204.871.401	6.394.342.217	6.105.627.703		87,86	96,42	95,96	98,36	-4,13	-0,56	94,65	Baik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.937.710.726	6.290.885.334	6.540.947.270	6.206.678.214		6.089.321.290	6.070.692.901	6.274.014.217	6.104.838.403		87,77	96,50	95,92	98,36	-3,49	0,12	94,64	Baik
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		138.684.000	133.188.000	120.672.000	0		127.444.000	123.310.000	118.643.000	0		91,90	92,58	98,32				94,27	Baik
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		1.800.000	11.000.000	1.692.500	800.000		1.800.000	10.868.500	1.685.000	789.300		100,00	98,80	99,56	98,66	124,59	122,05	99,26	Sangat Baik
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		3.743.280.717					2.667.204.249					71,25							
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3.743.280.717					2.667.204.249					71,25							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.743.280.717	10.000.000	2.400.000	3.500.000		2.667.204.249	0	2.400.000	3.500.000		71,25	0,00	100,00	100,00	-43,30		67,81	Kurang Baik
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.743.280.717	10.000.000	2.400.000	3.500.000		2.667.204.249	0	2.400.000	3.500.000		71,25	0,00	100,00	100,00	-43,30		67,81	Kurang Baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000	5.000.000	5.000.000			0	4.000.000	3.996.000			0,00	80,00	79,92			53,31	Kurang Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5.000.000	5.000.000	5.000.000			0	4.000.000	3.996.000			0,00	80,00	79,92			53,31	Kurang Baik
Administrasi Umum Perangkat Daerah		223.561.040	500.489.100	280.907.382	354.314.564		205.317.315	477.839.398	279.329.209	349.657.654		91,84	95,47	99,44	98,69	35,38	38,79	96,36	Sangat Baik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		86.020.340	114.331.600	70.193.200	116.846.440		74.484.700	107.494.700	69.470.050	112.739.550		86,59	94,02	98,97	96,49	20,26	23,74	94,02	Baik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10.922.700	93.931.500	14.966.000			10.402.800	87.445.666	14.909.000			95,24	93,10	99,62				95,98	Baik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		18.000.000	16.920.000	12.744.000	13.320.000		14.180.000	14.255.000	12.635.000	12.820.000		78,78	84,25	99,14	96,25	-8,72	-3,12	89,60	Baik
Fasilitasi Kunjungan Tamu		10.200.000	13.000.000	10.000.000	10.000.000		8.151.300	12.950.950	9.881.700	9.977.600		79,91	99,62	98,82	99,78	1,46	12,05	94,53	Baik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		98.418.000	262.306.000	173.004.182	214.148.124		98.098.515	255.693.082	172.433.459	214.120.504		99,68	97,48	99,67	99,99	52,09	50,75	99,20	Sangat Baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		603.366.404	663.946.784	629.617.517	571.463.942		495.070.710	589.953.092	606.555.721	548.859.475		82,05	88,86	96,34	96,04	-1,46	4,16	90,82	Baik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		295.393.104	317.570.064	267.648.997	255.860.000		213.434.130	260.697.112	249.476.962	234.330.345		72,25	82,09	93,21	91,59	-4,21	3,92	84,79	Baik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		307.973.300	346.376.720	361.968.520	315.603.942		281.636.580	329.255.980	357.078.759	314.529.130		91,45	95,06	98,65	99,66	1,39	4,48	96,20	Sangat Baik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		384.684.500	187.102.152	121.779.700	197.809.133		354.478.621	177.728.934	118.846.242	158.501.083		92,15	94,99	97,59	80,13	-7,95	-16,54	91,21	Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		125.254.500	73.912.152	75.540.200	123.841.633		98.177.001	68.391.334	74.136.452	96.441.298		78,38	92,53	98,14	77,87	8,38	2,72	86,73	Baik
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		41.155.000	83.190.000	16.927.500	41.837.500		38.825.000	79.351.600	15.561.947	30.712.700		94,34	95,39	91,93	73,41	56,55	40,45	88,77	Baik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		218.275.000	30.000.000	29.312.000	32.130.000		217.476.620	29.986.000	29.147.843	31.347.085		99,63	99,95	99,44	97,56	-26,31	-27,15	99,15	Sangat Baik
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.230.139.400					1.173.099.854					95,36							95,36	Baik
PENINGKATAN PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT	929.380.000					900.505.050					96,89							96,89	Sangat Baik
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	196.359.400					176.894.804					90,09							90,09	Baik
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN KEMITRAAN	104.400.000					95.700.000					91,67							91,67	Baik
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	306.019.000					305.158.000					99,72							99,72	Sangat Baik
PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	147.070.000					147.027.000					99,97							99,97	Sangat Baik
PENGELOLAAN OPINI PUBLIK	158.949.000					158.131.000					99,49							99,49	Sangat Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1.518.038.000	1.748.536.000	5.514.478.520	1.631.259.731		1.411.574.900	1.667.258.945	4.535.595.539	1.484.410.130		92,99	95,35	82,25	91,00	53,38	40,96	90,40	Sangat Baik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.518.038.000	1.748.536.000	5.514.478.520	1.631.259.731		1.411.574.900	1.667.258.945	4.535.595.539	1.484.410.130		92,99	95,35	82,25	91,00	53,38	40,96	90,40	Sangat Baik
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		37.194.000	68.728.000	70.571.680	48.828.000		37.052.000	67.851.140	68.840.785	48.075.554		99,62	98,72	97,55	98,46	18,88	18,14	98,59	Sangat Baik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		218.809.000	413.048.000	252.979.340	513.142.731		177.196.400	404.672.201	245.508.371	438.771.206		80,98	97,97	97,05	85,51	50,95	55,92	90,38	Baik
Pelayanan Informasi Publik		134.976.000	320.800.000	2.278.120.000	245.700.000		134.919.000	303.131.673	1.688.475.000	244.866.250		99,96	94,49	74,12	99,66	219,53	165,40	92,06	Baik
Layanan Hubungan Media		204.159.000	41.600.000	51.800.000	40.300.000		188.342.500	27.750.000	49.900.000	34.610.000		92,25	66,71	96,33	85,88	-25,77	-12,03	85,29	Baik
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		128.195.000	208.180.000	154.467.500	117.539.000		121.330.000	172.352.521	151.924.000	108.146.120		94,64	82,79	98,35	92,01	4,23	0,46	91,95	Baik
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		794.705.000	696.180.000	2.706.540.000	665.750.000		752.735.000	691.501.410	2.330.947.383	609.941.000		94,72	99,33	86,12	91,62	66,99	51,71	92,95	Baik
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2.439.053.000					2.401.772.690					98,47							98,47	Sangat Baik
PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN TEKNOLOGI	2.343.353.000					2.318.890.290					98,96							98,96	Sangat Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	95.70 0.000					82.882. 400					86,6 1							86,61	Baik
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT	730.3 82.50 0					707.326 .993					96,8 4							96,84	Sangat Baik
PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT	425.7 40.00 0					420.563 .460					98,7 8							98,78	Sangat Baik
PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT	113.9 45.00 0					112.847 .700					99,0 4							99,04	Sangat Baik
PENINGKATAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT	190.6 97.50 0					173.915 .833					91,2 0							91,20	Baik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1.808. 815.0 00	2.257.15 8.000	5.353.23 7.178	1.328.24 6.600		1.704.04 9.951	2.216.52 6.650	4.640.2 88.425	1.279.47 4.643		94,2 1	98,2 0	86,6 8	96,3 3	28,92	22,33	93,85	Baik
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		924.3 12.00 0	1.630.14 0.000	1.367.68 8.998	979.384. 500		844.247. 000	1.594.04 9.662	1.344.0 18.406	939.467. 823		91,3 4	97,7 9	98,2 7	95,9 2	10,62	14,34	95,83	Baik
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.500. 000	45.000.0 00	1.600.00 0	4.995.00 0		4.500.00 0	44.904.5 00	1.600.0 00	4.752.50 0		100, 00	99,7 9	100, 00	95,1 5	338,5 8	332,8 2	98,73	Sangat Baik
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		919.8 12.00 0	1.585.14 0.000	1.366.08 8.998	974.389. 500		839.747. 000	1.549.14 5.162	1.342.4 18.406	934.715. 323		91,3 0	97,7 3	98,2 7	95,9 3	9,95	13,59	95,81	Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		884.503.000	627.018.000	3.985.548.180	348.862.100		859.802.951	622.476.988	3.296.270.019	340.006.820		97,21	99,28	82,71	97,46	138,43	104,08	94,16	Baik
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		53.570.000	65.000.000	2.000.000	26.530.000		40.970.000	64.788.950	2.000.000	26.122.464		76,48	99,68	100,00	98,46	383,64	389,12	93,65	Baik
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		116.000.000	20.000.000	2.231.852.000	6.625.000		115.957.500	20.000.000	2.051.709.046	6.480.000		99,96	100,00	91,93	97,81	3625,60	3325,37	97,43	Sangat Baik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		530.850.000	425.000.000	1.704.069.000	244.324.100		523.084.000	421.161.598	1.194.942.813	238.611.560		98,54	99,10	70,12	97,66	65,12	28,07	91,35	Baik
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		184.083.000	117.018.000	47.627.180	71.383.000		179.791.451	116.526.440	47.618.160	68.792.796		97,67	99,58	99,98	96,37	-15,28	-16,62	98,40	Sangat Baik
SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	242.800.000					242.305.203					99,80							99,80	Sangat Baik
PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN	242.800.000					242.305.203					99,80							99,80	Sangat Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Urusan Statistik	13.00 0.000	15.00 0.000	135.000. 000	17.232.5 00	54.961.2 00	13.000. 000	14.713.4 00	133.044. 100	15.865. 000	54.007.8 00	100	98,0 9	98,5 5	92,0 6	98,2 7	236,7 7	242,4 4	97,39	Baik
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK DAERAH	13.00 0.000					13.000. 000					100, 00							100,00	Sangat Baik
PENGLOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL	13.00 0.000					13.000. 000					100, 00							100,00	Sangat Baik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		15.00 0.000	135.000. 000	17.232.5 00	54.961.2 00		14.713.4 00	133.044. 100	15.865. 000	54.007.8 00		98,0 9	98,5 5	92,0 6	98,2 7	310,5 7	318,8 6	96,74	Sangat Baik
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		15.00 0.000	135.000. 000	17.232.5 00	54.961.2 00		14.713.4 00	133.044. 100	15.865. 000	54.007.8 00		98,0 9	98,5 5	92,0 6	98,2 7	310,5 7	318,8 6	96,74	Sangat Baik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		15.00 0.000	125.000. 000	16.007.5 00	19.982.0 00		14.713.4 00	123.633. 100	14.640. 000	19.722.0 00		98,0 9	98,9 1	91,4 6	98,7 0	223,6 6	228,9 4	96,79	Sangat Baik
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		0	10.000.0 00	1.225.00 0	34.979.2 00		0	9.411.00 0	1.225.0 00	34.285.8 00			94,1 1	100, 00	98,0 2	- 173,2 8	- 157,2 7	97,38	
Urusan Persandian	104.4 51.00 0	26.33 8.750	85.000.0 00	93.934.0 00	205.633. 000	102.720 .400	26.338.7 50	84.083.2 92	90.063. 500	202.812. 690	98,3 4	100, 00	98,9 2	95,8 8	98,6 3	64,07	69,29	96,93	Sangat Baik
PENINGKATAN PENGLOLAAN PERSANDIAN	104.4 51.00 0					102.720 .400					98,3 4							98,34	Sangat Baik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan		Rata-Rata	Kategori
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PENGLOLAAN KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	104.451.000					102.720.400					98,34							98,34	Sangat Baik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		26.338.750	85.000.000	93.934.000	205.633.000		26.338.750	84.083.292	90.063.500	202.812.690		100,0	98,9	95,9	98,6	109,71	117,18	96,58	Sangat Baik
PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		26.338.750	85.000.000	93.934.000	205.633.000		26.338.750	84.083.292	90.063.500	202.812.690		100,0	98,9	95,9	98,6	109,71	117,18	96,58	Sangat Baik
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		26.338.750	85.000.000	93.934.000	205.633.000		26.338.750	84.083.292	90.063.500	202.812.690		100,0	98,9	95,9	98,6	109,71	117,18	96,58	Sangat Baik
Rata-rata											97,33	91,15	88,33	94,09	94,87				
Kategori											Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				

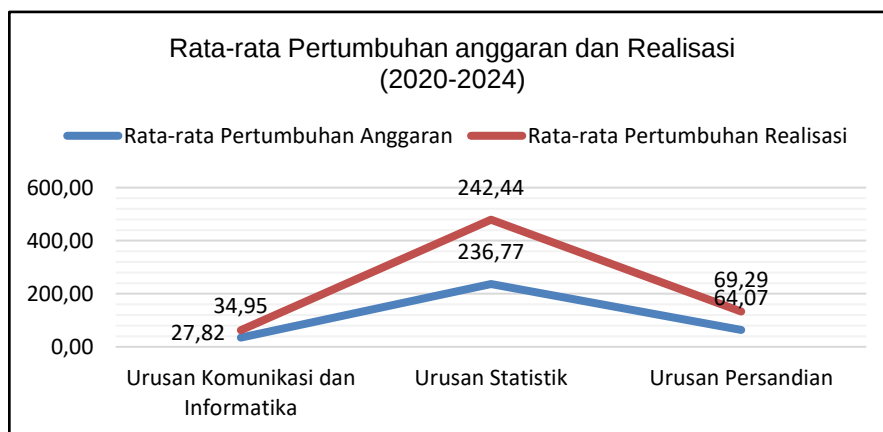
Berdasarkan tabel T.C-2.4 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, dapat dijelaskan bahwa tren perkembangan yang signifikan pada setiap urusan.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika, anggaran mengalami peningkatan dari Rp6,13 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp10,30 miliar pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 34,95%. Realisasi anggaran juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan rata-rata 27,82%, di mana persentase rasio realisasi terhadap anggaran berada pada kisaran 85,01% hingga 97,43%.

Pada Urusan Statistik, alokasi anggaran tumbuh pesat dari Rp13 juta pada tahun 2020 menjadi Rp54,09 juta pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 236,77%. Realisasi anggaran pun menunjukkan pertumbuhan rata-rata 242,44%, dengan rasio realisasi terhadap anggaran konsisten di atas 98%, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di bidang statistik.

Sementara itu, Urusan Persandian mengalami kenaikan alokasi anggaran dari Rp104,45 juta pada tahun 2020 menjadi Rp205,83 juta pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 64,07% dan pertumbuhan realisasi sebesar 69,29%. Rasio realisasi terhadap anggaran berada pada rentang 92,87% hingga 98,63%, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal.

Dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi 2020-2024

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun 2020–2024, terlihat bahwa pada urusan Komunikasi dan Informatika menunjukkan pertumbuhan anggaran rata-rata sebesar 9,77% dan realisasi 7,88%, dengan tren peningkatan yang stabil. Urusan Statistik memiliki pertumbuhan anggaran rata-rata 2,37% dan realisasi 2,24%, sedangkan urusan Persandian relatif stabil dengan pertumbuhan anggaran 0,67% dan realisasi 0,29%. Data ini mencerminkan efisiensi penyerapan anggaran serta fokus pembiayaan yang lebih besar pada pengelolaan komunikasi dan informatika dibandingkan urusan lainnya.

2.1.3.2 Kinerja Pelayanan Indikator Makro Penyelenggaraan Urusan

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tidak terlepas dari capaian indikator kinerja makro penyelenggaraan urusan; baik komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, capaian keberhasilan kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	83,45	Indikator sebelumnya Persentase e-Government Perangkat Daerah yang terintegrasi
2	Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	%	N/A	N/A	N/A	N/A	60,98	Indikator sebelumnya Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar
3	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	N/A	N/A	40,19	47,80	51,23	Penilaian oleh kementerian dilaksanakan mulai tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja pada urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Probolinggo berdasarkan beberapa indikator selama tahun 2020 hingga 2024. Berikut adalah penjelasan sederhana terkait capaian tersebut:

1. Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi:

Pada tahun 2024, persentase sistem elektronik yang terintegrasi mencapai 83,45%. Sebelumnya, indikator ini diukur berdasarkan persentase perangkat e-Government daerah yang terintegrasi.

2. Persentase Badan Publik yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik:

Pada tahun 2024, capaian ini tercatat sebesar 60,98%. Sebelumnya, penilaian dilakukan berdasarkan penerapan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah sesuai dengan standar yang ada.

3. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI):

Capaian IMDI pada tahun 2024 adalah 51,23%. Penilaian ini dilakukan berdasarkan penilaian kementerian yang dimulai pada tahun 2022 dan mengukur perkembangan digitalisasi masyarakat di Indonesia.

Secara keseluruhan, capaian kinerja ini menggambarkan upaya peningkatan sistem elektronik, keterbukaan informasi, dan digitalisasi masyarakat di Kota Probolinggo.

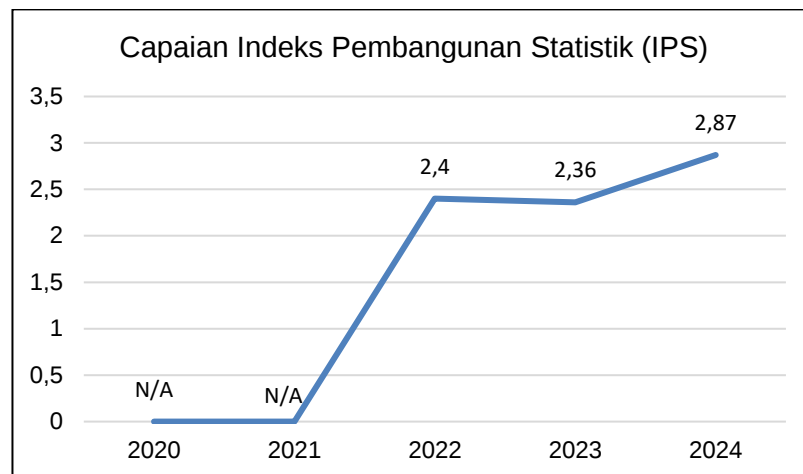
Pelaksanaan kinerja urusan Statistik selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Urusan Statistik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	N/A	N/A	2,4	2,36	2,87	Penilaian dilaksanakan oleh BPS mulai tahun 2022
2	Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	N/A	69	Pengukuran dimulai tahun 2024

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan statistik di Kota Probolinggo adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa tidak terdapat data atau nilai capaian untuk tahun

2020 hingga 2021 (ditandai dengan N/A), yang mengindikasikan bahwa pengukuran IPS belum dilakukan atau belum tersedia pada periode tersebut. Namun, mulai tahun 2022, terdapat perkembangan dengan diperolehnya nilai IPS sebesar 2,4, meskipun pada tahun berikutnya, yaitu 2023, mengalami sedikit penurunan menjadi 2,36. Kemudian, pada tahun 2024, indeks ini kembali meningkat dan mencapai 2,87.

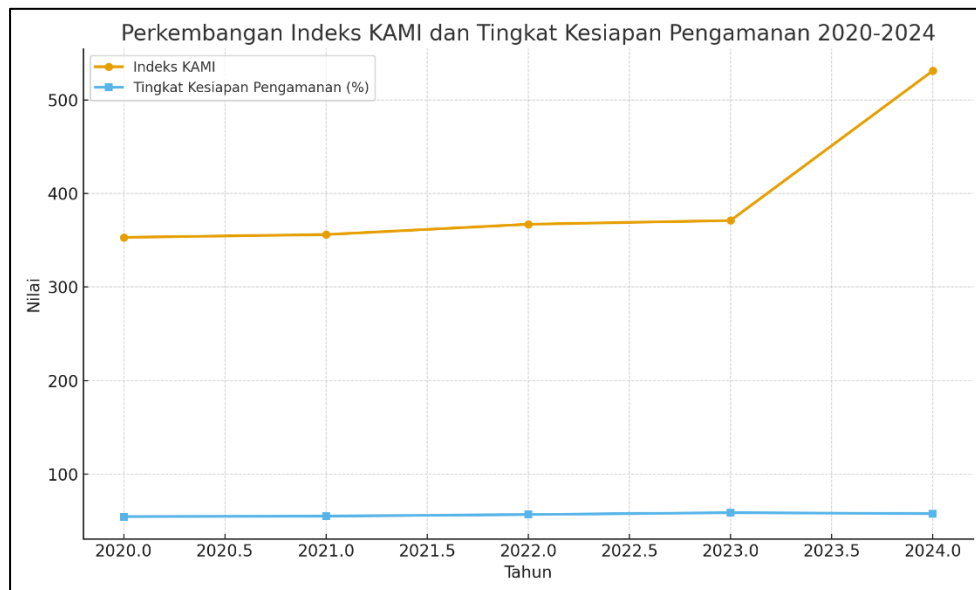


Gambar 2. 3 Capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2020-2024

Peningkatan nilai IPS pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Hal ini mencerminkan upaya yang semakin kuat dalam membangun ekosistem statistik daerah yang lebih baik dan berkelanjutan, meskipun masih perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk mencapai kualitas statistik yang optimal.

Untuk indikator makro kedua, yakni Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas yang dilaksanakan pengukuran sejak tahun 2024 dengan capaian sebesar 69%.

Pelaksanaan kinerja pada urusan persandian dapat dilihat dalam grafik berikut :



Gambar 2. 4 Capaian Kinerja Urusan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil pengukuran, Indeks KAMI menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan nilai masing-masing sebesar 353, 356, 367, dan 371. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 531, yang mencerminkan adanya perbaikan besar dalam aspek tata kelola dan kesiapan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah relatif stabil sepanjang periode 2020–2024, dengan capaian sebesar 54,72% di tahun 2020, meningkat secara bertahap hingga mencapai 58,89% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 57,84% di tahun 2024.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa kesiapan keamanan informasi pemerintah daerah berada pada kategori baik, dengan tren positif yang perlu terus dipertahankan. Lonjakan Indeks KAMI pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya penguatan keamanan informasi, meskipun tetap diperlukan langkah berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian tingkat kesiapan pengamanan di tahun-tahun mendatang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas pada 3 (tiga) urusan (Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian), tingkat keberhasilan capaian Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo juga tidak terlepas dari eksistensi kelompok sasaran layanan.

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12 Kelompok Sasaran Layanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Urusan	Program	Sasaran	Keterangan
Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Masyarakat, insan pers (media cetak, media online, media elektronik), - PPID Pembantu - Admin pengaduan pada setiap perangkat daerah - Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	- Penyampaian informasi - Pengelolaan Permohonan Informasi - Pengelolaan pengaduan - Kemitraan informasi dengan masyarakat
	Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Perangkat Daerah, Operator teknologi informasi (TI) - Masyarakat - Relawan TIK/Komunitas lain	- Pelatihan TI, pemanfaatan dan pengembangan sistem elektronik, koordinasi SPBE - Pemanfaatan aplikasi - Pengelolaan ekosistem kota cerdas
Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Perangkat Daerah, Operator dan verifikatur data - Badan Pusat Statistik	- Produsen dan pemanfaatan data, Pelatihan dan pendampingan pengelolaan statistik - Pembinaan dan pendampingan pengelolaan statistik sektoral

Persandian	Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah, ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Pemanfaatan sertifikat elektronik (sistem elektronik dan tanda tangan elektronik)
------------	--	---	---

Dari pengelompokan sasaran layanan tersebut diatas, baik pada urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika tetap memperhatikan keterlibatan perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan/miskin sebagai penerima manfaat layanan. Beberapa hal diantaranya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program dinas tetap memperhatikan akses informasi yang inklusif; bagi penyandang disabilitas (penyediaan konten dengan bahasa isyarat), program khusus untuk perempuan (dialog interaktif), perlindungan anak (internet sehat), penyediaan papan informasi (untuk mengakomodir kalangan masyarakat luas) dan beberapa layanan lainnya.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo melaksanakan kemitraan dengan beberapa lembaga, seperti:

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, terkait pemberian layanan permohonan informasi;
2. Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, sebagai pembina statistik di daerah;
3. Bapperida Kota Probolinggo, sebagai koordinator Forum Satu Data Kota Probolinggo;
4. Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) BSSN, terkait keamanan informasi.

2.1.6 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Selama 2019-2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo telah menjalin kerjasama dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi, sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Data Kerjasama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo

No.	Tahun	Nomor Kerjasama		Nama Pihak Kerjasama		Jenis Kerjasama	Perihal	Masa Berlaku Dokumen	Jangka Waktu		Keterangan
		Pihak 1	Pihak 2	Pihak 1	Pihak 2				Awal	Akhir	
1	2019	027.4/086/425.113/2019	C.04/PKS/BJIK-BPPT/PEMKOT PROBOLINGGO/II/2019	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	BJIK (Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi) Badan pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Perjanjian Kerjasama	Penyediaan Pelayanan Cloud Server	1 tahun	2 Januari 2019	31 Desember 2019	Pemanfaatan cloud aplikasi keuangan
2	2019	6.94.11/1768/425.113/2019	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Perjanjian Kerjasama	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik di lingkup pemerintah Kota Probolinggo	5 tahun	26 Nopember 2019	26 Nopember 2024	Pemanfaatan TTE
3	2020	134.4/19/KS/425.011/2020	014/PKS/JT-KT.PB/IV/2020	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	JASNITA	Perjanjian Kerjasama	Penyediaan Layanan Cloud Server Aplikasi Nomor Tunggul Panggilan Darurat 112	1 tahun	2 Januari 2020	31 Desember 2020	Pemanfaatan NTPD 112

No.	Tahun	Nomor Kerjasama		Nama Pihak Kerjasama		Jenis Kerjasama	Perihal	Masa Berlaku Dokumen	Jangka Waktu		Keterangan
		Pihak 1	Pihak 2	Pihak 1	Pihak 2				Awal	Akhir	
4	2020	134.4/20/KS/425.011/2020	001/D.07/AMIK_YPKK/I/2020	Pemerintah Kota Probolinggo	AMIK Taruna Probolinggo	Kesepakatan Bersama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kota Probolinggo	1 tahun	23 Januari 2020	31 Desember 2020	Sharing knowledge TIK
5	2020	134.4/21/KS/425.011/2020	002/D.07/AMIK_YPKK/I/2020	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	AMIK Taruna Probolinggo	Perjanjian Kerjasama	Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 tahun	23 Januari 2020	31 Desember 2020	Masukan penyusunan dokumen SPBE
6	2021	134.4/09/KS/425.011/2021	001A/PKS/JT-KT.PB/I/2021	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	JASNITA	Perjanjian Kerjasama	Penyediaan Layanan Cloud Server Aplikasi Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	1 tahun	11 Januari 2021	31 Desember 2021	Pemanfaatan NTPD 112

No.	Tahun	Nomor Kerjasama		Nama Pihak Kerjasama		Jenis Kerjasama	Perihal	Masa Berlaku Dokumen	Jangka Waktu		Keterangan
		Pihak 1	Pihak 2	Pihak 1	Pihak 2				Awal	Akhir	
7	2023	000.4.7.2/583/425.1 13/2023	PERJ.214/BSS N/SU/HK.07.02/ 05/2023	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Perjanjian Kerjasama	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	4 tahun	17 Maret 2023	17 Maret 2027	Pemanfaatan TTE
8	2024	100.3.7.1/13/KS/425.011/2024	001/J.07/AMIK.YPKK/III/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo	AMIK Taruna Probolinggo	Perjanjian Kerjasama	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 tahun	13 Maret 2024	13 Maret 2027	Sharing knowledge TIK dan pengelolaan aplikasi

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Permasalahan pembangunan dapat ditelusuri melalui evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi atas suatu perkara yang sedang terjadi. Perkara tersebut di masa yang akan datang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta merujuk pada dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 14 Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Integrasi aplikasi dan sistem informasi di perangkat daerah masih rendah	- Masih banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas antar perangkat daerah - Proses pertukaran data dan informasi belum otomatis sehingga memperlambat layanan publik	- Tidak adanya standar integrasi aplikasi yang baku - Koordinasi antar perangkat daerah belum optimal - Keterbatasan SDM TIK dalam pengembangan dan integrasi sistem

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Infrastruktur jaringan dan server yang belum merata kualitasnya.
2	Belum optimalnya pengelolaan satu data	- Data sektoral antar perangkat daerah belum sepenuhnya terintegrasi ke portal Satu Data - Validasi dan pemutakhiran data tidak konsisten - Pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas.	- Mekanisme dan SOP pengelolaan data sektoral belum dipatuhi secara konsisten - Koordinasi antara walidata, produsen data, dan pembina data belum intens - Keterbatasan kapasitas SDM statistik - Kurangnya pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dan analitik.
3	Kematangan pelaksanaan kebijakan keamanan serta audit keamanan informasi masih rendah	- Sistem keamanan informasi di beberapa perangkat daerah belum memenuhi standar keamanan nasional - Audit keamanan informasi jarang dilakukan secara menyeluruh - Kesadaran keamanan siber di kalangan pegawai masih rendah.	- Belum adanya pedoman teknis yang detail terkait kebijakan keamanan informasi di level daerah - Anggaran khusus untuk keamanan siber terbatas - Kurangnya pelatihan dan sertifikasi SDM terkait keamanan informasi - Infrastruktur keamanan (<i>firewall</i>, IDS/IPS, backup, enkripsi) belum lengkap dan merata.

Mengacu pada tabel T-B.35. dapat digambarkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian pada periode 2020–2024 menunjukkan masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan pada periode perencanaan 2025–2029.

- 1) Integrasi aplikasi dan sistem informasi antar perangkat daerah masih rendah.

Kondisi ini ditunjukkan oleh masih beroperasinya berbagai aplikasi secara terpisah tanpa keterhubungan antarsistem, sehingga proses pertukaran data dan informasi belum berlangsung secara otomatis dan berdampak

pada efisiensi layanan publik. Akar permasalahan meliputi belum tersusunnya standar baku integrasi aplikasi, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kualitas infrastruktur jaringan dan server yang belum merata. Hal ini menjadi kendala nantinya dalam penerapan Pemerintahan Digital sebagai pengauatan kebijakan SPBE.

2) Pengelolaan Satu Data daerah belum optimal.

Permasalahan ini tercermin dari belum sepenuhnya terintegrasinya data sektoral antar perangkat daerah ke dalam portal Satu Data, validasi dan pemutakhiran data yang belum konsisten, serta pemanfaatan data yang belum maksimal untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Akar permasalahan mencakup belum optimalnya penerapan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan data sektoral, lemahnya koordinasi antara walidata, produsen data, dan pembina data, keterbatasan kapasitas SDM di bidang statistik, serta rendahnya pemanfaatan teknologi big data dan analisis data.

3) Kematangan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi dan audit keamanan informasi masih rendah.

Beberapa perangkat daerah belum memenuhi standar keamanan informasi sesuai ketentuan nasional, audit keamanan belum dilaksanakan secara komprehensif, serta kesadaran keamanan siber di lingkungan aparatur masih terbatas. Akar permasalahan meliputi belum tersedianya pedoman teknis yang komprehensif terkait kebijakan keamanan informasi di tingkat daerah, keterbatasan alokasi anggaran khusus keamanan siber, minimnya pelatihan dan sertifikasi SDM di bidang keamanan informasi, serta belum memadainya infrastruktur keamanan seperti *firewall*, *intrusion detection/prevention system* (IDS/IPS), sistem cadangan (*backup*), dan enkripsi data.

Selain permasalahan pokok diatas, dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni pemanfaatan aplikasi pengaduan publik (Lapor SP4N) belum merata dan maksimal.

2.2.2 Isu Strategis

Beberapa faktor mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Untuk merumuskan isu strategis dilakukan dengan identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, permasalahan, isu KLHS yang relevan, isu lingkungan dinamis yang relevan; baik global, nasional dan regional.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, transparansi informasi publik, tata kelola data yang efisien, serta perlindungan terhadap keamanan informasi. Sejumlah potensi yang dimiliki antara lain:

1. Pemanfaatan aplikasi dalam digitalisasi layanan pemerintahan dan layanan publik.
2. Komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan.
3. Penyelenggaraan Forum Satu Data dan pemanfaatan Portal Satu Data.
4. Terbentuknya Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Probolinggo.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, isu strategis yang relevan dengan pelaksanaan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan dan implementasi SPBE;
2. Belum optimalnya pengelolaan satu data Kota Probolinggo;
3. Pemanfaatan teknologi informasi-jaringan, hardware, software dan media sosial pelayanan dari pemerintah ke masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan, pemerintah daerah juga dituntut mendukung implementasi Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa:

- 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3)

Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.

Tabel 2. 15 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pemanfaatan aplikasi dalam digiltalisasi layanan pemerintahan dan layanan publik	Integrasi Aplikasi dan sistem informasi di perangkat daerah masih rendah	Belum optimalnya pengembangan dan implementasi SPBE	Kesenjangan digital antar negara	Pencapaian Asta Cita 7, yakni Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan fokus pada Transformasi Digital Pemerintah (TDP)	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Peningkatan integrasi sistem elektronik
Komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan	Pemanfaatan aplikasi lapor SP4N belum maksimal	Pemanfaatan teknologi informasi-jaringan, hardware, software dan media sosial pelayanan dari pemerintah ke Masyarakat		Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan literasi digital melalui Cerdig (cerdas digital)	Peningkatan efektivitas layanan pengaduan publik berbasis digital
Penyelenggaraan Forum Satu Data dan pemanfaatan Portal Saru Data	Belum Optimalnya pengelolaan satu data	Belum optimalnya pengelolaan satu data Kota Probolinggo	Kebutuhan interoperabilitas dan integrasi data secara global untuk pengambilan keputusan berbasis data	Peningkatan kualitas data pembangunan	Penguatan kolaborasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data daerah	Penguatan tata kelola data yang terintegrasi dan berkualitas

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Terbentuknya <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) Kota Probolinggo	Kematangan Pelaksanaan Kebijakan Keamanan serta audit keamanan informasi masih rendah	Belum optimalnya pengembangan dan implementasi SPBE	Ancaman keamanan siber meningkat	Rencana Aksi Nasional (RAN) Keamanan Siber Tahun 2024-2028	Peningkatan kesiapsiagaan dan respons terhadap insiden siber di tingkat daerah melalui Jaguar Jatim (Jaga Ruang Siber)	Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah

Berdasarkan analisis potensi, permasalahan, serta isu lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan integrasi sistem elektronik;
2. Peningkatan efektivitas layanan pengaduan publik berbasis digital dan merata;
3. Penguatan tata kelola data yang terintegrasi dan berkualitas;
4. Peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah;

Isu-isu tersebut diatas akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan strategis dalam periode 2025–2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran yang mengandung makna:

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Dalam mewujudkan sasaran strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo menetapkan tujuan mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029, khususnya pada pencapaian Misi ke-IV Kota Probolinggo: **Birokrasi Adaptif, Modern dan Berorientasi Layanan**, dengan Tujuan: **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik**, dan Sasaran: **Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis**.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam mewujudkan sasaran strategis Kota Probolinggo menetapkan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Terintegrasi

3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan diatas, ditentukan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan ketiga urusan; komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagai berikut:

- Sasaran 1. Meningkatnya integrasi sistem elektronik yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik;
- Sasaran 2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;
- Sasaran 3. Meningkatnya manajemen keamanan informasi;
- Sasaran 4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian <u>Sasaran RPJMD:</u> Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Meningkatnya digitalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *	4,09	1,74 - 1,97	1,84 - 2,12	1,94 - 2,26	2,04 - 2,41	2,14 - 2,55	*Catatan : Mulai tahun 2026 dilakukan penguatan indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)
		Meningkatnya integrasi sistem elektronik yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	85%	86%	87%	88%	89%	90%	
			Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	73,17%	75,61%	78,05%	80,49%	82,93%	85,37%	
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,93	2,98	3,03	3,08	3,13	3,18	
		Meningkatnya manajemen keamanan informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	62,09%	63,18%	64,27%	65,36%	65,90%	66,45%	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kominfo	87,60	87,63	87,66	87,69	87,72	87,75	

3.3 Strategi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah.

Mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo terkait dengan Misi IV Kota Probolinggo (Birokrasi Adaptif, Modern dan Berorientasi Layanan), dengan strategi “Penerapan prinsip *Good Governance* yang didukung Profesionalitas SDM dan Digitalisasi”.

Secara garis besar, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo untuk tahun 2025 – 2026 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern dan Adaptif			
MISI IV : Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya digitalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi	1. Meningkatnya integrasi sistem elektronik yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik	1. Penguatan interoperabilitas sistem informasi antar sektor untuk mendukung efisiensi tata kelola pemerintahan	1. Memperkuat tata kelola dan pengelolaan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Peningkatan infrastruktur TIK pemerintahan untuk menjamin konektivitas dan aksesibilitas layanan digital antar-perangkat daerah
	2. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	1. Penguatan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral yang andal dan terpadu.	1. Penguatan peran Dinas Kominfo sebagai Wali Data dalam kerangka Satu Data Indonesia di tingkat kota 2. Peningkatan kualitas data sektoral melalui pembinaan produsen

VISI : Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern dan Adaptif			
MISI iV : Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			data dan verifikasi berkala 3. Pemanfaatan teknologi digital dan analitik data dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
	3. Meningkatnya manajemen keamanan informasi	1. Memperkuat tata kelola keamanan informasi	1. Pengembangan dan integrasi layanan pemerintahan berbasis digital untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas birokrasi 2. Penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi (cyber security) guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah
	4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern	1. Penguatan implementasi SAKIP secara konsisten di seluruh bidang 2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, monitoring, dan evaluasi

Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo terdapat dalam penahapan pembangunan. Pada tahap ini dilaksanakan penyelarasan dengan penahapan pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan tema pembangunan setiap tahunnya. Secara umum digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan ketahanan pangan sebagai dasar pembangunan sosial ekonomi produktif dan inklusif	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan infrastruktur ekonomi untuk mengungkit pemerataan kesejahteraan	Akselerasi pembangunan sosial inklusif serta ekonomi hijau dan berkelanjutan menuju masyarakat tangguh dan sejahtera	Percepatan pengembangan dan penyebaran inovasi untuk modernisasi sektor-sektor strategis daerah	Memantapkan Kota Probolinggo yang sejahtera, modern, dan adaptif sebagai pondasi menuju Kota Logistik, Tangguh dan Berkelanjutan
Penguatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, bersih dan efektif	Perluasan sistem merit dan peningkatan akuntabilitas birokrasi	Perluasan pemanfaatan inovasi digital yang mengungkit pada pelayanan publik berkualitas	Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pemanfaatan data yang optimal dan birokrasi digital	Perluasan kemitraan strategis pemerintah dan transformasi digital
Pondasi Digital dan Tata Kelola Data, melalui Penyusunan arsitektur SPBE yang terintegrasi dan Perumusan kebijakan data terbuka dan interoperabilitas antar sistem	Penguatan Sistem Layanan dan Interoperabilitas dengan fokus pada Digitalisasi proses bisnis dan integrasi sistem layanan	Optimalisasi Layanan Berbasis Data dan Penerapan dimensi Smart City	Peningkatan Partisipasi dan Kolaborasi Digital melalui pengembangan platform partisipasi publik berbasis digital	Evaluasi, Kemandirian, dan Replikasi
Penguatan Tata Kelola dan Pemetaan Data Sektoral	Standarisasi, Pengumpulan, dan Konsolidasi Data	Integrasi dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Audit Kualitas Data dan Literasi Statistik	Keberlanjutan, Publikasi, dan Sertifikasi Kualitas Data
Penyusunan Kebijakan dan Pemetaan Risiko	Standarisasi dan Sistem Proteksi Dasar dengan Penerapan standar dan perlindungan infrastruktur utama	Monitoring, Enkripsi, dan Audit Keamanan	Kesiapan insiden dan kerja sama kelembagaan	Kelembagaan permanen dan peningkatan berstandar

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, transparan, dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Renstra ini terdiri dari lima tahap pembangunan yang bersifat progresif dan

berkesinambungan, dengan fokus utama pada transformasi digital, integrasi sistem, keterbukaan informasi, serta peningkatan partisipasi publik.

Tahap I (Tahun 2026): Pembangunan Pondasi Digital

Pada tahap awal ini, prioritas utama adalah membangun dasar digital yang kuat melalui:

- Penyusunan arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terintegrasi serta perumusan kebijakan data terbuka dan interoperabilitas antar sistem;
- Penyusunan tata kelola data dan pemetaan data sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data;

Tahap II (Tahun 2027): Penguatan Sistem dan Layanan

Memasuki tahun kedua, fokus diarahkan pada penguatan sistem dan digitalisasi layanan publik:

- Penguatan sistem layanan dan interoperabilitas dengan mendorong digitalisasi proses layanan serta integrasi lintas sektor;
- Standardisasi data dan sistem proteksi dasar, termasuk penguatan sistem keamanan data dan infrastruktur utama;

Tahap III (Tahun 2028): Optimalisasi Layanan dan Interoperabilitas

Pada tahap ini, program-program yang telah dibangun mulai dioptimalkan dan diterapkan secara luas:

- Implementasi nyata interoperabilitas antar sistem dengan fokus pada integrasi lintas instansi;
- Pemanfaatan dan integrasi data statistik sektoral dalam pengambilan keputusan;
- Penguatan keamanan informasi melalui proses monitoring, enkripsi, dan audit keamanan;

Tahap IV (Tahun 2029): Partisipasi Digital dan Pemanfaatan Data

Pada tahun keempat, fokus diarahkan pada partisipasi aktif publik serta pemanfaatan data secara optimal:

- Peningkatan partisipasi dan kolaborasi digital melalui platform digital partisipatif;

- Pelaksanaan audit kualitas data dan penguatan literasi statistik masyarakat;
- Peningkatan kesiapan institusi menghadapi kondisi darurat melalui kerja sama kelembagaan.

Tahap V (Tahun 2030): Evaluasi, Replikasi, dan Kemandirian Sistem

Sebagai tahap akhir dalam siklus perencanaan, dilakukan konsolidasi dan penguatan kelembagaan:

- Evaluasi menyeluruh, replikasi sistem yang berhasil, serta penguatan kemandirian teknologi informasi pemerintah;
- Penguatan publikasi, sertifikasi, dan standarisasi kualitas data secara nasional.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

Sesuai Inmendagri 2 Tahun 2025, Arah kebijakan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

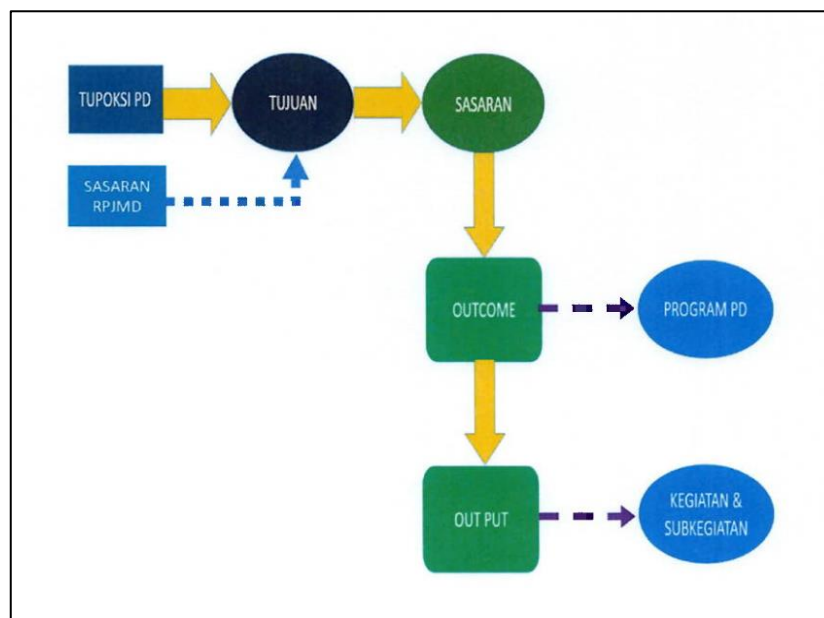
No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah dan sub urusan aplikasi informatika yang meliputi pengelolaan nama domain dan pengelolaan e-government	Pengembangan ekosistem digital yang andal, aman dan aksesibel dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan	Memperkuat tata kelola dan pengelolaan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Peningkatan infrastruktur TIK pemerintahan untuk menjamin konektivitas dan aksesibilitas layanan digital antar-perangkat daerah	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
2	Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik antara pemerintah pusat dan daerah; dan menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung hasil penelitian pengembangan dan berbasis satu data	Penguatan peran Dinas Kominfo sebagai Wali Data dalam kerangka Satu Data Indonesia di tingkat kota	
			Peningkatan kualitas data sektoral melalui pembinaan produsen data dan verifikasi berkala	
			Pemanfaatan teknologi digital dan analitik data dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	
3	Pelaksanaan Layanan Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah	Pengembangan ekosistem digital yang andal, aman dan aksesibel dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan	Pengembangan dan integrasi layanan pemerintahan berbasis digital untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas birokrasi	
			Penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi (<i>cyber security</i>) guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang disertai juga dengan indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Mengutip dari Inmendagri 2/2025 proses perumusannya digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Adapun numenklatur dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun 2025-2029 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian Sasaran RPJMD: Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Meningkatnya digitalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
		Meningkatnya integrasi sistem elektronik yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik			Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Tingkat kepuasan pengguna (internal/eksternal) terhadap layanan aplikasi informatika (survei)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Meningkatnya pengelolaan nama domain dan sub	Persentase domain dan subdomain pemerintah daerah yang aktif	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				domain pada perangkat daerah		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Meningkatnya penerapan layanan perangkat daerah berbasis elektronik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Layanan Berbasis Elektronik	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
				Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan	Penyediaan Akses Internet	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	akses internet yang disediakan oleh Dinas		
				Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya integrasi sistem elektronik yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik			Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			publik pemerintah daerah				
				Meningkatnya diseminasi informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota.	Persentase masyarakat sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Relasi Media	
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif endiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Monitoring Informasi	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
				Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Diseminasi Informasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Penyusunan Konten	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya integrasi data statistik sektoral pada Portal Satu Data Indonesia	Persentase data sektoral yang terintegrasi ke portal Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
		Meningkatnya manajemen keamanan informasi			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Meningkatnya layanan keamanan informasi	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya pola hubungan komunikasi sandi	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel			Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kominfo		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah		Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tercapainya Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Terkelolanya Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Administrasi Kepegawaian PD sesuai ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya tatalaksana tepat waktu	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, program/kegiatan/sub kegiatan disusun dengan periode waktu tahun 2026-2030. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan perencanaan perangkat daerah, khususnya penyusunan Renja Tahun 2030 sebagai tahun transisi.

4.1 Uraian Program

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dirumuskan program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika

Indikator : Persentase Tingkat kepuasan pengguna (internal/eksternal) terhadap layanan aplikasi informatika (survei)

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Outcome : Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah

Indikator : Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Outcome : Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Indikator : Persentase Data Statistik Sektor yang Memenuhi Prinsip Satu Data

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Outcome : Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah

Indikator : Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Outcome : Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Adapun kegiatan yang dirumuskan untuk periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan 1: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan 2: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kegiatan 1: Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan 1: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan 2: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan 3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan 4: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan 5: Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan 6: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan 7: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Adapun kegiatan yang dirumuskan untuk periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan 1: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Kegiatan 2: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 1: Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Sub Kegiatan 2: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan 3: Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

Sub Kegiatan 4: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan

Sub Kegiatan 6: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Sub Kegiatan 7: Penyediaan Akses Internet

Sub Kegiatan 8: Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan 9: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 1: Relasi Media

Sub Kegiatan 2: Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Sub Kegiatan 3: Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan 4: Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Sub Kegiatan 5: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Sub Kegiatan 6: Diseminasi Informasi

Sub Kegiatan 7: Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan 8: Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Sub Kegiatan 9: Penyusunan Konten

Sub Kegiatan 10: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Kegiatan 1: Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional

Sub Kegiatan 2: Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia

Sub Kegiatan 3: Peningkatan Kualitas Statistik Sektor

Sub Kegiatan 4: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - Kegiatan 1: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan 1: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
 - Kegiatan 2: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan 1: Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan 2: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
 - Kegiatan 3: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan 1: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Kegiatan 4: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan 1: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Kegiatan 5: Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan 1: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan 2: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan 3: Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan 4: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan 6: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan 7: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	100 %	100 %	9.781.50 9.361	100 %	10.053.4 09.939	100 %	10.263.0 34.469	100 %	10.478.5 33.167	100 %	10.693.9 74.987	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 %	90 %	26.250.0 00	90 %	27.562.5 00	90 %	27.562.5 00	90 %	29.000.0 00	90 %	50.000.0 00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	15.750.0 00	7 dokumen	16.537.5 00	7 dokumen	16.537.5 00	7 dokumen	17.000.0 00	7 dokumen	25.000.0 00	PUG
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	10.500.0 00	7 Laporan	11.025.0 00	7 Laporan	11.025.0 00	7 Laporan	12.000.0 00	7 Laporan	25.000.0 00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat	100 %	100 %	7.987.54 0.851	100 %	8.182.54 4.939	100 %	8.242.54 4.939	100 %	8.250.54 4.939	100 %	8.454.42 2.487	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Daerah Sesuai Ketentuan												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	47 Orang /bulan	7.882.54 0.851	50 Orang /bulan	8.062.54 4.939	52 Orang /bulan	8.112.54 4.939	55 Orang /bulan	8.120.54 4.939	60 Orang /bulan	8.314.42 2.487	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semester SKPD	13 Lapora n	13 Lapor an	105.000. 000	13 Lapor an	120.000. 000	13 Lapor an	130.000. 000	13 Lapor an	130.000. 000	13 Lapor an	140.000. 000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	11.000.0 00	100 %	12.000.0 00	100 %	12.000.0 00	100 %	12.000.0 00	100 %	25.000.0 00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Lapora n	11.000.0 00	1 Lapora n	12.000.0 00	1 Lapora n	12.000.0 00	1 Lapora n	12.000.0 00	1 Lapora n	25.000.0 00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD sesuai ketentuan	100 %	100 %	25.500.000	100 %	26.775.000	100 %	26.775.000	100 %	211.775.000	100 %	120.775.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		2 Dokumen	10.500.000	2 Dokumen	11.025.000	2 Dokumen	11.025.000	2 Dokumen	11.025.000	2 Dokumen	100.025.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	6 Orang	15.000.000	2 Orang	15.750.000	2 Orang	15.750.000	55 Orang	200.750.000	5 Orang	20.750.000	Untuk tahun 2028 direncanakan melaksanakan peningkatan kapasitas untuk seluruh ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	636.000.000	100 %	676.187.500	100 %	773.187.500	100 %	813.187.500	100 %	830.187.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	12 Paket	288.750.000	12 Paket	303.187.500	12 Paket	400.187.500	12 Paket	400.187.500	12 Paket	400.187.500	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	8 Dokume n	8 Dokum en	21.000.0 00	8 Dokum en	23.000.0 00	8 Dokum en	23.000.0 00	8 Dokum en	23.000.0 00	8 Dokum en	25.000.0 00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapora n	12 Lapor an	26.250.0 00	12 Lapor an	35.000.0 00	12 Lapor an	35.000.0 00	12 Lapor an	40.000.0 00	12 Lapor an	45.000.0 00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapora n	12 Lapor an	300.000. 000	12 Lapor an	315.000. 000	12 Lapor an	315.000. 000	12 Lapor an	350.000. 000	12 Lapor an	360.000. 000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100 %	100 %	664.418. 510	100 %	722.750. 000	100 %	742.750. 000	100 %	747.750. 000	100 %	757.750. 000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	12 Lapor an	309.418. 510	12 Lapor an	350.000. 000	12 Lapor an	360.000. 000	12 Lapor an	365.000. 000	12 Lapor an	375.000. 000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Lapora n	12 Lapor an	355.000. 000	12 Lapor an	372.750. 000	12 Lapor an	382.750. 000	12 Lapor an	382.750. 000	12 Lapor an	382.750. 000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kantor yang Disediakan												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	80 %	80 %	430.800. 000	80 %	395.590. 000	80 %	418.214. 530	80 %	414.275. 728	80 %	445.840. 000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	200.800. 000	10 Unit	205.840. 000	10 Unit	215.840. 000	10 Unit	175.840. 000	10 Unit	215.840. 000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.0 00	1 Unit	42.000.0 00	1 Unit	42.000.0 00	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000.0 00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	90.000.0 00	25 Unit	57.750.0 00	25 Unit	80.374.5 30	25 Unit	88.435.7 28	25 Unit	90.000.0 00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabili- tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha- bilitasi	2 Unit	2 Unit	100.000. 000	2 Unit	90.000.0 00	2 Unit	80.000.0 00	2 Unit	100.000. 000	2 Unit	90.000.0 00	PUG
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	N/A	81%	1.814.57 2.529	82%	1.865.01 2.937	83%	1.903.90 0.485	84%	1.943.87 7.752	85%	1.983.84 4.469	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota.	N/A	100%	1.814.57 2.529	100%	1.865.01 2.937	100%	1.903.90 0.485	100%	1.943.87 7.752	100%	1.983.84 4.469	
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	500.000. 000	12 Laporan	515.000. 000	12 Laporan	520.000. 000	12 Laporan	535.000. 000	12 Laporan	565.000. 000	PUG Komuni kasi Publik

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	31 Komunitas	31 Komunitas	165.000.000	31 Komunitas	220.000.000	31 Komunitas	220.000.000	31 Komunitas	215.000.000	31 Komunitas	215.000.000	Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan	3 Permohonan	100.000.000	5 Permohonan	130.000.000	5 Permohonan	130.000.000	5 Permohonan	145.000.000	5 Permohonan	145.000.000	PUG Komunikasi Publik
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100%	100%	39.000.000	100%	48.000.000	100%	48.000.000	100%	48.000.000	100%	48.000.000	Komunikasi Publik
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas	24 Rekomendasi	24 Rekomendasi	70.000.000	24 Rekomendasi	75.000.000	24 Rekomendasi	75.000.000	24 Rekomendasi	85.000.000	24 Rekomendasi	85.000.000	PUG Komunikasi Publik

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemerintah Daerah												
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100%	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	PUG Komunikasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	10 Media	10 Media	807.572.529	10 Media	723.512.937	10 Media	747.400.485	10 Media	750.877.752	10 Media	760.844.469	PUG Komunikasi Publik
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	Komunikasi Publik
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	640 Konten	650 Konten	20.000.000	660 Konten	35.000.000	660 Konten	35.000.000	660 Konten	45.000.000	660 Konten	45.000.000	Komunikasi Publik
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	N/A	150 Orang	75.000.000	150 Orang	75.000.000	150 Orang	85.000.000	150 Orang	75.000.000	150 Orang	75.000.000	Komunikasi Publik

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Tingkat kepuasan pengguna (internal/ekstern al) terhadap layanan aplikasi informatika (survei)	N/A	81%	1.658.26 8.868	82%	1.704.36 4.439	83%	1.739.90 2.291	84%	1.776.43 5.997	85%	1.812.96 0.059	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dengan Domain dan Sub Domain yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	100%	100%	25.000.0 00	100%	30.000.0 00	100%	35.000.0 00	100%	40.000.0 00	100%	45.000.0 00	
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	1 Dokum en	25.000.0 00	1 Dokum en	30.000.0 00	1 Dokum en	35.000.0 00	1 Dokum en	40.000.0 00	1 Dokum en	45.000.0 00	
Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan	100%	100%	1.633.26 8.868	100%	1.674.36 4.439	100%	1.704.90 2.291	100%	1.736.43 5.997	100%	1.767.96 0.059	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Berbasis Elektronik												
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	N/A	8 Dokume n	45.000.0 00	8 Dokume n	47.000.0 00	8 Dokume n	49.000.0 00	8 Dokume n	50.000.0 00	8 Dokume n	51.000.0 00	PUG SPBE
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	28 perangkat daerah	28 perangka t daerah	35.000.0 00	28 perangka t daerah	35.000.0 00	28 perangka t daerah	35.000.0 00	28 perangka t daerah	35.000.0 00	28 perangka t daerah	35.000.0 00	SPBE
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 layanan	3 layanan	45.000.0 00	3 layanan	45.000.0 00	3 layanan	45.000.0 00	3 layanan	45.000.0 00	3 layanan	45.000.0 00	SPBE

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	SPBE
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	N/A	4 Aplikasi	200.000.000	4 Aplikasi	116.000.000	4 Aplikasi	221.000.000	4 Aplikasi	152.000.000	4 Aplikasi	182.000.000	PUG SPBE
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	12 laporan	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	20.000.000	SPBE

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	N/A	15 Aplikasi	35.000.000	15 Aplikasi	40.000.000	15 Aplikasi	45.000.000	15 Aplikasi	52.000.000	15 Aplikasi	63.000.000	SPBE
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	N/A	12 Laporan	315.000.000	12 Laporan	284.068.375	12 Laporan	183.212.294	12 Laporan	236.419.158	12 Laporan	180.087.098	PUG SPBE
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	80 Perangkat Daerah	80 Perangkat at Daerah	836.268.868	80 Perangkat at Daerah	973.296.064	80 Perangkat at Daerah	1.022.689.997	80 Perangkat at Daerah	1.051.016.839	80 Perangkat at Daerah	1.094.872.961	SPBE
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses	N/A	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	17.000.000	3 Dokumen	17.000.000	3 Dokumen	18.000.000	3 Dokumen	19.000.000	SPBE

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah												
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	N/A	2 Dokumen	72.000.000	2 Dokumen	82.000.000	2 Dokumen	52.000.000	2 Dokumen	62.000.000	2 Dokumen	63.000.000	PUG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data	68%	72%	191.001.870	74%	196.311.226	76%	200.404.529	78%	204.612.535	80%	208.819.431	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi ke portal Satu Data Indonesia	70%	88%	191.001.870	89%	196.311.226	90%	200.404.529	91%	204.612.535	92%	208.819.431	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah	80%	42%	13.201.870	46%	11.511.226	50%	11.604.529	54%	14.812.535	58%	10.019.431	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik												
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	20,75%	14,62%	106.800.000	18%	107.800.000	21%	110.800.000	24%	110.800.000	27%	110.800.000	
Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	100%	33.000.000	PUG
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	234 Orang	122 Orang	40.000.000	122 Orang	45.000.000	122 Orang	45.000.000	122 Orang	45.000.000	122 Orang	45.000.000	PUG
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan	N/A	42	10.000.000	47	10.000.000	52	10.000.000	57	10.000.000	62	10.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kegiatan statistik sektoral												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	531	580	244.915.384	590	251.723.396	600	256.972.102	605	262.367.890	610	267.762.253	
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang Diterapkan	58,30%	60%	235.000.000	60%	240.000.000	62%	245.000.000	62%	250.000.000	64%	255.000.000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	229.415.384	28 Perangkat Daerah	226.223.396	28 Perangkat Daerah	236.000.000	28 Perangkat Daerah	240.000.000	28 Perangkat Daerah	243.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.500.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	50%	50%	9.915.384	50%	11.723.396	50%	11.972.102	50%	12.367.890	50%	12.762.253	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	9.915.384	2 Kegiatan	11.723.396	2 Kegiatan	11.972.102	2 Kegiatan	12.367.890	2 Kegiatan	12.762.253	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dari sejumlah sub kegiatan pada kegiatan yang diampu pada ketiga urusan; komunikasi dan informatika, statistik dan persandian terdapat sub kegiatan yang menjadi prioritas. Sub kegiatan tersebut meliputi:

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terkait dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan highlight intervensi terhadap Program Unggulan Daerah Kota Probolinggo untuk Tahun 2025-2029, Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam upaya peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, dan pencapaian kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Relasi Media Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
			Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025–2029, sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika, Dinas Kominfo Kota Probolinggo melaksanakan beberapa sub kegiatan prioritas, antara lain:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan;

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Dengan tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah, sub kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Relasi media;
- b. Pelayanan informasi publik;
- c. Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik;
- d. Pengelolaan media komunikasi publik.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Dalam rangka mencapai kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan Sistem Statistik Nasional (SSN), dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan prinsip satu data;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Untuk meningkatkan keamanan siber dan informasi di lingkungan pemerintah daerah, sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah;
- b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 harus untuk dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana dalam IKU yang dimaksud dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Probolinggo Tahun 2025-2029 ialah indikator tujuan dan sasaran Renstra. Secara penjenjangan kinerja IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas yang akan dipertanggung jawabkan setiap tahunnya dalam laporan kinerja tahunan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, dapat digambarkan dalam target IKU sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4. 4 Target Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks SPBE*	Nilai	4.04	4,09	1,74 - 1,97	1,84 - 2,12	1,94 - 2,26	2,04 - 2,41	2,14 - 2,55	*Catatan : Mulai tahun 2026 dilakukan penguatan indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)
2	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	%	83,45	85	86	87	88	89	90	
3	Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	%	60,98	73,17	75,61	78,05	80,49	82,93	85,37	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,87	2,93	2,98	3,03	3,08	3,13	3,18	
5	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	50	62,09	63,18	64,27	65,36	65,90	66,45	
6	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kominfo	Nilai	87,53	87,60	87,63	87,66	87,69	87,72	87,75	

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo pada periode 2025–2029, telah ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan fokus

utama pada penguatan SPBE, integrasi sistem elektronik, keterbukaan informasi publik, penguatan statistik daerah, keamanan informasi, dan akuntabilitas kinerja.

1. Indeks SPBE

Indikator ini menggambarkan perkembangan implementasi e-government di Kota Probolinggo.

Dengan baseline capaian tahun 2024 yang mencapai 4,04, target capaian dimulai dari 4.09 pada tahun 2025 dan untuk selanjutnya akan menjadi Indeks Pemdi (Pemerintahan Digital) dengan target 1,74 - 1,97 pada tahun 2026 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2,14 - 2,55 pada tahun 2030.

Target SPBE tersebut telah diselaraskan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 000.7.2.2/14241/201.2/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

2. Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi

Indikator ini menggambarkan tingkat integrasi antar sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

$$f(x) = \frac{\sum \text{Sistem Elektronik yang terintegrasi}}{\sum \text{Sistem Elektronik}} \times 100\%$$

Capaian pada tahun 2024 sebesar 83,45%, target 85% pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 90% pada tahun 2030, mencerminkan komitmen terhadap transformasi digital yang terintegrasi dan efisien.

3. Persentase Badan Publik yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ini mengukur komitmen badan publik dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun rumusan formulasi yang digunakan adalah:

$$f(x) = \frac{\sum \text{Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik}}{\sum \text{Badan Publik}} \times 100\%$$

Indikator dengan capaian sebesar 60,98% pada tahun 2024. Dimulai dari 73,17% pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 85,37% pada tahun 2030, ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

4. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Diperoleh dari nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

$$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$$

dengan:

K adalah Banyaknya domain penilaian;

Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;

Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;

IPS mencerminkan kualitas pengelolaan data statistik di daerah, dan pada akhir tahun 2024 mencapai 2,87. Target yang ditetapkan menunjukkan tren positif dari 2,93 pada tahun 2025 menjadi 3,18 pada tahun 2030, sejalan dengan penguatan satu data dan kebijakan berbasis data.

5. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Indikator ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman keamanan siber. Target meningkat dari capaian 50% pada tahun 2024 menjadi 62,09% pada 2025 sampai 66,45% pada 2030, sejalan dengan pengembangan *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* dan Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber.

6. Nilai SAKIP pada Dinas Kominfo

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan nilai evaluasi yang dilaksanakan oleh APIP internal (inspektorat), menjadi cerminan efektivitas perencanaan dan pelaporan kinerja. Target meningkat dari 87,60 pada tahun 2025 hingga 87,75 pada 2030, yang mencerminkan komitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Keberhasilan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo juga harus diukur melalui indikator. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang berdampak langsung terhadap capaian pembangunan daerah yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah, baik pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kunci digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	%	83,45	85	86	87	88	89	90	
2	Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	%	60,98	73,17	75,61	78,05	80,49	82,93	85,37	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	84,04	84,5	85	85,5	86	86,5	87	
	Urusan Statistik									
1	Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas	%	69	70	71	72	73	74	75	
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,87	2,93	2,98	3,03	3,08	3,13	3,18	
	Urusan Persandian									
1	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	531	570	580	590	600	605	610	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	50	62,09	63,18	64,27	65,36	65,90	66,45	

Tabel 4.5 menyajikan indikator kinerja kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang terbagi dalam tiga urusan, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, serta Urusan Persandian. Pada urusan Komunikasi dan Informatika, terdapat indikator Persentase Layanan Publik yang

diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target sampai dengan tahun 2030 mencapai 87%. Indikator ini diperoleh dari rumusan:

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$

Keterangan:

- Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya
- Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik

Untuk urusan Statistik, indikator yang digunakan adalah Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas, yang juga menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, mencerminkan perbaikan kualitas tata kelola data statistik daerah. Indikator ini diperoleh dari rumusan:

$$f(x) = \frac{\sum \text{Data statistik sektoral yang berkualitas}}{\sum \text{Data statistik sektoral}} \times 100\%$$

Keterangan:

Data Statistik sektoral yang berkualitas adalah data yang memenuhi prinsip Satu Data berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sedangkan pada urusan Persandian, indikator Indeks Keamanan Informasi mengalami peningkatan bertahap setiap tahun, sejalan dengan upaya memperkuat keamanan informasi publik di tengah ancaman siber yang meningkat.

$$f(x) = \frac{\sum \text{Nilai per Area Keamanan Informasi} \times 100\%}{\sum \text{Area Penilaian}}$$

Penjelasan :

Indeks KAMI mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah daerah, dengan menilai 6 (enam) area pengamanan informasi, yaitu:

1. Tata kelola keamanan informasi
2. Pengelolaan resiko keamanan informasi
3. Kerangka kerja keamanan informasi
4. Pengelolaan aset informasi
5. Teknologi dan keamanan informasi
6. Pelindungan Data Pribadi

BAB V PENUTUP

Rencana lima tahunan ini merupakan wujud komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam mengakselerasi transformasi digital daerah secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan tahapan strategis per tahun, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, partisipatif, serta adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 ini selanjutnya akan dijadikan payung hukum dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2030;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, terikat dan membangun komitmen bersama untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

Probolinggo, 19 September 2025


Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Probolinggo
Madiah, S.K.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 119750312 199703 2 003